

SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN *GOOD GOVERNANCE* DAN INDEPENDENSI TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (Studi pada Auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)

MUHAMMAD FAISAL



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN *GOOD GOVERNANCE* DAN INDEPENDENSI TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (Studi pada Auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FAISAL
A31107501**



Kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN *GOOD GOVERNANCE* DAN INDEPENDENSI TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (Studi pada Auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FAISAL
A31107501**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 29 Januari 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., MS, Ak
NIP 196301161988101001

Drs. Muh. Nur Azis, MM
NIP 196012311988111004

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini SE., M.Si., Ak
NIP 196503051992032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faisal

NIM : A31107501

Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH PEMAHAMAN *GOOD GOVERNANCE* DAN INDEPENDENSI
TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH
(Studi pada Auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Januari 2014

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6000

Muhammad Faisal

PRAKATA

Puji syukur peneliti penjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Pemahaman *Good Governance* dan Independensi terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah SWT memberikan balasannya. Dengan ini ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada :

1. Orangtua tercinta Bapak Muh. Akbar Dewa dan Ibu Najmiah serta adik-adik tersayang Fauziah dan Amel sebagai motivator peneliti untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Drs. Syamsuddin, M.Si., Ak selaku Penasihat Akademik (PA), Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung., SE., MS., Ak dan Bapak Drs. Muh. Nur Aziz, MM selaku dosen pembimbing, dan Bapak Drs. Muallimin., M.Si, Bapak Dr. H. Arifuddin, SE., M.Si., Ak., CA, dan Bapak Drs. Syahrir, M.Si., Ak selaku dosen penguji.
3. Seluruh dosen beserta staf/pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti selama perkuliahan.

4. Seluruh auditor dan staf/pegawai di Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas bantuan dan kesediaan meluangkan waktunya.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan Ayu Dewi Riharna Najib, Uga, Harry, Edy Muharezky, Muhammad Alamsyah Bonno', Ryan Rizaldhy Iksan, Inaty Octabrina, Kusnadi Zainuddin, Cute Van Maw, Andi Safiuddin Sapada, Farah Diba, Andi Muhammad Rafii, Dinar Indra Purnawan, Muammar Faruk, Karmani Kamar, Muhammad Sofyan, Irfandy Januar, Sachnan Saputra, Jatmiko, Moch. Rhezdy, Ayu Lestari, Rizka Murfiya Zuliyanti, Syamsul Huda, Indi Soraya, dan terakhir untuk Mutmainnah Armin . Kalian sudah banyak menemani saat senang dan susah. Semoga segala harapan dan cita-cita kita semua segera tercapai. Amin ya.
6. Angkatan 2007 Jurusan Akuntansi yang sudah lebih dulu beranjak dari kampus dan yang masih bertahan. Semangat !!!
7. Dan seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Dan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 29 Januari 2014

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh Pemahaman *Good Governance* dan Independensi terhadap Kinerja Auditor (Studi pada Auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)

Muhammad Faisal
Gagaring Pagalung
Muh. Nur Azis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman *good governance* dan independensi pada auditor pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) pada auditor pemerintah (auditor eksternal) yang disebar kepada 50 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Uji hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa pemahaman *good governance* dan independensi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, yaitu sebesar 65,9% sedangkan sisanya, yaitu sebesar 34,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam rangka peningkatan kinerja auditor tersebut, maka diperlukan adanya peningkatan (1) pemahaman *good governance* pada auditor pemerintah BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, (2) independensi, yaitu *Independence in fact* dan *Independence in appearance*.

Kata kunci : *good governance*, independensi, dan kinerja auditor

ABSTRACT

***Understanding the Influence of Good Governance and the Independence of
the Auditor Performance
(Studies in Representative BPKP Auditor in South Sulawesi)***

Muhammad Faisal
Gagaring Pagalung
Muh. Nur Azis

This study aims to analyze the influence of understanding of good governance and the independence of the auditor BPK Representative government in South Sulawesi. The research data was obtained from questionnaires (primary) government auditors (external auditors) are distributed to 50 respondents. This type of research is the study of causality. Hypothesis testing using multiple linear regression showed that the understanding of good governance and independence together significant effect on the performance of auditors, amounting to 65.9% while the rest, amounting to 34.1% influenced by other factors. In order to improve the performance of the auditors, it would require an increase in (1) the auditor's understanding of good governance in the South Sulawesi government BPKP Representative, (2) independence, the Independence in fact and Independence in appearance.

Keywords: *good governance, independence, and auditor*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Praktis	5
1.5 Organisasi/Sistematika	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kerangka Teoritis	7
2.1.1 Kinerja Auditor	7
2.1.2 Penilaian Kinerja	8
2.1.3 Independensi	9
2.1.4 <i>Good Governance</i>	11
2.1.5 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	13
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Pikir	17
2.4 Hipotesis	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Rancangan Penelitian	19
3.2 Tempat dan Waktu	19
3.3 Teknik Penentuan Sampel	19

3.3.1	Populasi	19
3.3.2	Sampel	20
3.4	Teknik Pengumpulan Data	21
3.4.1	Jenis Data	21
3.4.2	Sumber Data	21
3.4.3	Pengumpulan Data	22
3.5	Instrumen Penelitian	22
3.5	Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	23
3.6	Teknik Analisis	24
3.6.1	Teknik Skala Pengukuran	24
3.6.2	Analisis Deskriptif	25
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	25
3.6.4	Uji Kualitas Data	26
3.7	Uji Hipotesis	27
3.7.1	Uji Regresi Linier Berganda	27
3.7.2	Uji Parsial (Uji t)	28
3.7.3	Uji Simultan (Uji F)	28
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		30
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	30
4.2	Deskripsi Data	37
4.3	Karakteristik Responden	38
4.3.1	Jenis Kelamin	38
4.3.2	Umur	39
4.3.3	Pendidikan	39
4.3.4	Masa Kerja	40
4.4	Analisis Deskriptif	41
4.5	Uji Kualitas Data	42
4.5.1	Uji Validitas	42
4.5.2	Uji Realibilitas	43
4.6	Deskripsi Variabel Penelitian	44
4.7	Uji Asumsi Klasik	48
4.8	Pengujian Hipotesis	50
4.8.1	Pengaruh Pemahaman <i>Good Governance</i> terhadap Kinerja Auditor	51
4.8.2	Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor	52
4.8.3	Analisis Regresi Linear Berganda	52
4.9	Pembahasan Hasil Penelitian	55
4.9.1	Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Kinerja Auditor ..	55
4.9.2	Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor	56

BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
5.3 Keterbatasan Penelitian	58
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	15
3.2	Bobot Penilaian	24
4.1	Rincian Penyebaran Kuesioner	38
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	39
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	39
4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	40
4.6	Deskriptif Pervariabel	41
4.7	Uji Validitas Data	42
4.8	Uji Realibilitas	43
4.9	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden Mengenai Independensi	45
4.10	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden Mengenai <i>Good Governance</i>	46
4.11	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Auditor	47
4.12	Uji Normalitas	48
4.13	Uji Multikolinearitas	50
4.14	Hasil Perhitungan Uji-t untuk Variabel <i>Good Governace</i>	51
4.15	Hasil Perhitungan Uji-t untuk Variabel Independensi	52
4.16	Rangkuman Hasil Uji-F Analisis Regresi Berganda	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	18
4.1 Struktur Organisasi	37
4.2 <i>Scatterplot</i>	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Deskriptif Data
Lampiran 3	Frekuensi Data
Lampiran 4	Uji Kualitas Data
Lampiran 5	Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu tugas seorang auditor adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang telah di audit tentu saja lebih terpercaya kewajarannya dibanding laporan keuangan yang belum di audit.

Seorang auditor yang baik dapat dinilai dari kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja auditor adalah pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah di selesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja auditor di masa yang akan datang, memberikan *feedback* tentang kualitas kerja, kemudian mempelajari kemajuan perbaikan yang dikehendaki dalam kinerja.

Perlu disadari bahwa kinerja auditor saat ini telah menjadi sorotan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih. Mengingat beberapa tahun terakhir ini di Indonesia permasalahan hukum erat berkaitan dengan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara efektif.

Dalam peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal;

Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. Dalam pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP merupakan lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Independensi merupakan sikap yang tidak mudah terpengaruh dan tidak memihak kepada siapapun. Auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor memperoleh kepercayaan dari klien dan para pengguna laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pengguna laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Independensi auditor dapat terpengaruh jika auditor mempunyai kepentingan keuangan atau mempunyai hubungan usaha dengan klien yang diaudit. Menurut Lanvin (1976) dalam Supriyono (1988) bahwa "independensi auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu (1) Ikatan keuangan dan usaha dengan klien, (2) Jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan klien, dan (3) Lamanya hubungan kantor akuntan publik dengan klien". Oleh karena itu auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap independen, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan independensinya diragukan oleh masyarakat.

Asistensi penerapan *good corporate governance* terdapat dalam daftar salah satu kegiatan yang dilakukan BPKP. "Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempengaruhi kinerja auditor. Dengan tata kelola yang baik seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang lain atau bawahannya sehingga orang tersebut mau melakukan kehendaknya untuk mencapai tujuan meskipun secara pribadi hal tersebut tidak disenangi" (Luthans, 2002:575). *Good governance* adalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berkarya. Definisi lain *good governance* menurut Widyananda (2008) adalah "sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara terbuka, transparan, akuntabel, *aquitable*, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat". Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep *good governance* mengandung unsur demokratis, adil, transparan, partisipatif, dan kemitraan.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2007) dalam penelitiannya bahwa "pemahaman *good governance* tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor jika auditor tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak menegakkan independensinya. Dengan kata lain pengaruh *good governance* tidak signifikan". Sedangkan hasil penelitian Purba (2013) membuktikan bahwa "*good corporate governance* dan independensi berpengaruh positif signifikan dengan kinerja auditor". Penelitian Sapariyah (2011) juga membuktikan bahwa "*good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor namun independensi auditor berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja auditor".

Karena adanya perbedaan tersebut, maka penulis ingin membahas variabel-variabel pada penelitian sebelumnya dengan mengambil lokasi

penelitian di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman *Good Governance* dan Independensi terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi pada Auditor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan)”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian di atas maka di rumuskan masalah peneliiian sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman *good governance* berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor.
2. Untuk menguji signifikansi pengaruh independensi terhadap kinerja auditor.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Untuk kalangan akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan lebih lanjut, bagaimana dapat menciptakan profesi akuntan yang memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi akuntansi.
2. Untuk rekan-rekan mahasiswa akuntansi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh pemahaman *good governance* dan independensi terhadap kinerja auditor, sehingga pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para auditor untuk lebih profesional lagi dalam menjalankan peran mereka sebagai penyedia informasi. Penelitian ini juga diharapkan kontribusi praktisnya untuk organisasi penyedia jasa akuntan terutama pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola sumber daya manusia yang profesional.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi halaman judul, halaman lembar, persetujuan pembimbing, halaman lembar pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman prakarta, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan teori dan konsep yaitu, Independensi; *good governance*; dan kinerja auditor, serta tinjauan empirik, dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik analisis, dan uji hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu pengumpulan data dan pemilihan sampel, serta penjelasan tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KERANGKA TEORITIS

2.1.1 Kinerja Auditor

“Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu” (Mahsun, 2007). Sedangkan menurut Robbin (2001), “kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama, pengertian kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai individu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Pengertian kinerja auditor menurut Mulyadi (2002:11) adalah “akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (*examination*) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan”. Kalbers dan Forgarty (1995) mengemukakan bahwa “kinerja auditor sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan langsung”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. "Kinerja dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), di mana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan" (Trisnaningsih, 2007).

2.1.2 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan personilnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang, memberikan nilai umpan balik tentang kualitas kerja untuk kemudian mempelajari kemajuan perbaikan yang dikehendaki dalam kinerja.

Menurut Larkin (1990) dalam Trisnaningsih (2007) "terdapat empat dimensi personalitas untuk mengukur kinerja, yaitu kemampuan (*ability*), komitmen profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal *auditing* maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan". Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut. Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Adapun kepuasan kerja auditor adalah tingkat kepuasan individu auditor

dengan posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau teman seprofesi lainnya.

2.1.3 Independensi

Arens et al., (2003) menyatakan “nilai *auditing* sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor”. Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang ada. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Independensi adalah sikap tidak memihak. Independensi adalah salah satu faktor yang menentukan kredibilitas pendapat auditor. Dua kata kunci dalam pengertian independensi, yaitu :

1. Objektivitas, yaitu suatu kondisi yang tidak bias, adil, dan tidak memihak.
2. Integritas, yaitu prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandangi, dan mengemukakan fakta apa adanya.

Teori sikap dan perilaku (*theory of attitude and behaviour*) yang dikembangkan oleh Soegiastuti (2005:92) dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan independensi. Teori tersebut menyatakan, bahwa “perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan), dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan”.

Kebanyakan literatur independensi auditor menyarankan bahwa kredibilitas laporan keuangan tergantung pada persepsi audit independen dari seorang auditor eksternal oleh pengguna laporan keuangan. Kasidi (2007:28) dalam tesisnya mengemukakan alasan bahwa “jika auditor terlihat tidak independen, maka pengguna laporan keuangan semakin tidak percaya atas laporan keuangan yang dihasilkan auditor dan opini auditor tentang laporan keuangan perusahaan yang diperiksa menjadi tidak ada nilainya”. Kredibilitas seorang auditor tidak hanya pada independensi dalam fakta, tetapi juga pada independensi dalam persepsi atau penampilan, guna menjaga dan mempertahankan kepercayaan publikasikan profesinya sebagai auditor.

The CPA Handbook dalam tesis Kasidi (2007:28) mendefinisikan independensi sebagai berikut.

Independensi adalah suatu standar *auditing* yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun.

Kode Etik Akuntan pada tahun 1994 menyebutkan bahwa “Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas”.

Independensi menyangkut kemampuan untuk bertindak obyektif serta penuh integritas. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang secara psikologis memiliki intelektual tinggi dan penuh dengan kejujuran. Oleh karena itu independensi adalah *state of mind* yang tidak mudah untuk diukur. Penilaian terhadap independensi terbatas pada evaluasi terhadap *appearance*, terhadap cara dan hasil kerja yang dilakukan oleh akuntan publik. Untuk tujuan praktis seorang akuntan publik harus bebas dari hubungan-hubungan yang memiliki potensi untuk menimbulkan bias dalam memberikan opini atas laporan keuangan klien.

Nilai *auditing* bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor. Independensi dalam audit artinya mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan uji audit, evaluasi hasil audit, dan pelaporan audit.

2.1.4 Good Governance

Good governance adalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. “*Good governance* juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, *equitable*, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat” (Widyananda, 2008).

Konsep *governance* bukan merupakan konsep baru. Ia telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Dalam pembahasan sederhana, *governance* berarti proses pembuatan kebijakan dan proses implementasinya. Kata *governance* dapat digunakan dalam berbagai konteks: pemerintahan

korporasi, pemerintahan internasional, pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal.

Menurut *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (<http://www.google.com/UNESCAP>) tentang *good governance*, sebagai berikut.

Governance means "the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)". Good governance has 8 major characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law. It assures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into account and that the voices of the most vulnerable in society are heard in decision-making. It is also responsive to the present and future needs of society.

Bank Dunia pun mendefinisikan tentang *good governance* sebagai, "*The exercise of political power to manage a nation's affairs. The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*".

Fokus analisis atas pelaku *good governance* terdiri atas, pertama, negara, yang dijabarkan dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif serta militer. Kedua, masyarakat sipil, terdiri atas LSM, ormas, media massa, asosiasi berdasarkan profesionalitas, kelompok-kelompok agama dll. Dan ketiga, pasar ekonomi. Ketiga pelaku *good governance* saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Untuk dapat dikatakan sebagai *good governance*, maka tidak boleh ada satu pihak yang memegang kontrol penuh atas semuanya, sehingga tercipta keseimbangan antar ketiganya dengan memegang prinsip-prinsip dasar; akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut harus diterjemahkan ke dalam relasi antara negara, masyarakat sipil dan pasar ekonomi.

2.1.5 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental dalam *good governance* yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Partisipasi (*participation*), yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yaitu kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.
2. Penegakan Hukum (*rule of law*), di mana partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis.
3. Transparansi (*transparency*) adalah unsur lain yang menopang terwujudnya *good governance*. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli Indonesia telah terjerembab dalam kubangan korupsi yang berkepanjangan dan parah. Untuk itu, pemerintah harus menerapkan transparansi dalam proses kebijakan publik. Menurut Gaffar (2001) yaitu terdapat delapan aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu (1) Penetapan posisi, jabatan dan kedudukan, (2) Kekayaan pejabat publik, (3) Pemberian penghargaan, (4) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, (5) Kesehatan, (6) Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, (7) Keamanan dan ketertiban, dan (8) Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat

4. Responsif (*responsive*). Gaffar (2001) menegaskan bahwa “pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat-masyarakatnya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginannya, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum”.
5. Konsensus (*consensus*). Prinsip ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga akan memiliki kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.
6. Kesenjangan (*equity*), yaitu *good governance* juga harus didukung dengan asas kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan di Indonesia karena kenyataan sosiologis bangsa kita sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama, dan budaya.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu konsep efektivitas dalam sektor kegiatan-kegiatan publik memiliki makna ganda yakni efektivitas dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaan, baik oleh pejabat publik maupun partisipasi masyarakat, dan kedua, efektivitas dalam konteks hasil, yakni mampu memberikan kesejahteraan pada sebesar-besarnya kelompok dan lapisan sosial.
8. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu asas akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Secara teoritik, akuntabilitas menyangkut dua dimensi yakni akuntabilitas vertikal yang memiliki pengertian

bahwa setiap pejabat harus mempertanggung jawabkan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugasnya terhadap atasan yang lebih tinggi, dan yang kedua akuntabilitas horisontal yaitu pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara.

9. Visi Strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seseorang yang memiliki jabatan publik atau lembaga profesional lainnya, harus memiliki kemampuan menganalisa persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya.

2.2 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai acuan dari penelitian ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan, antara lain :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Tahun	Masalah	Hasil
1.	Trisnaningsih	2007	Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman <i>Good Governance</i> , Gaya Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman <i>good governance</i> tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor. Auditor yang hanya memahami <i>good governance</i> tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak menegakkan independensinya maka tidak akan berpengaruh terhadap kinerjanya. 2. Secara implisit pemahaman <i>good governance</i> dapat meningkatkan kinerja auditor jika auditor tersebut selama dalam pelaksanaan pemeriksaan selalu menegakkan independensi auditor. Hal ini terbukti bahwa independensi auditor berfungsi sebagai variabel intervening

Lanjutan Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Tahun	Masalah	Hasil
				dalam hubungan antara pemahaman <i>good governance</i> terhadap kinerja auditor.
2.	Noveri	2010	Pengaruh pemahaman <i>Good Governance</i> dengan Independensi auditor, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dengan komitmen organisasi sebagai mediasi terhadap kinerja auditor internal	Pemahaman <i>Good Governance</i> mampu memaksimalkan kinerja auditor internal dalam pelaksanaan tugas dan akan jauh lebih baik lagi jika kinerja auditor internal telah menerapkan independensi auditor dalam pelaksanaan tugas.
3.	Sapariyah	2011	Pengaruh <i>Good Governance</i> dan independensi auditor terhadap kinerja auditor dan komitmen organisasi	<i>Good Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Independensi auditor berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja auditor
4.	Purba	2013	Pengaruh independensi, komitmen organisasi, pemahaman <i>Good Governance</i> , dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah BPKP Riau	Independensi auditor dan pemahaman <i>Good Governance</i> keduanya berpengaruh positif terhadap kinerja auditor
5.	Martina	2013	Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali	Menunjukkan bahwa independensi, profesionalisme, dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Yang membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat independensi, profesionalisme, dan etika profesi maka semakin tinggi pula hasil kinerja yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

Lanjutan Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

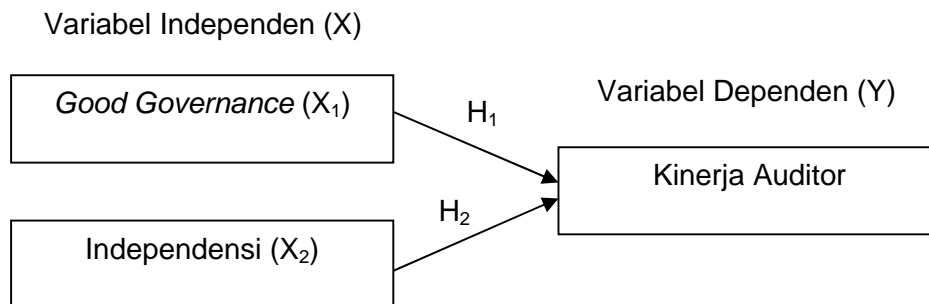
No.	Penulis	Tahun	Masalah	Hasil
6.	Fadilah	2013	<i>The Influence of Good Governance Implementation to Organization Performance : Analysis of Factors Affecting (Study on Intitution Amil Zakat Indonesia)</i>	Pengaruh <i>good governance</i> terhadap <i>organization performance</i> dengan melihat <i>internal control</i> dan <i>Total Quality Management (TQM)</i> menunjukkan bahwa permintaan terhadap <i>good governance</i> yang <i>accountability</i> dan <i>transparency</i> sangat tinggi. Dimana <i>internal control</i> dan TQM berpengaruh secara parsial terhadap <i>organization performance</i> .

2.3 KERANGKA PIKIR

Auditor pemerintah merupakan orang yang memiliki predikat profesional. Maka selayaknya seorang auditor harus bertingkah laku terhormat, karena dibutuhkannya kepercayaan publik yang tinggi atas kualitas jasa yang diberikan. Akan tetapi, untuk sekarang ini telah banyak bermunculan kasus-kasus yang berkaitan dengan profesi auditor. Banyaknya trik-trik rekayasa laporan keuangan berdampak buruk terhadap profesi auditor. Maka dari itu, untuk menjaga citra baik profesi auditor maka seorang auditor harus tetap menjaga independensinya sebagai penyedia informasi keuangan serta dibutuhkan pemahaman *good governance* yang baik untuk seorang auditor pemerintah agar mampu menjalankan perannya sebagai auditor yang profesional sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik dan sesuai dengan kode etik profesinya.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Di mana variabel independennya adalah *good governance* (X_1) dan independensi (X_2), sedangkan variabel dependennya adalah kinerja auditor. Sebagai alur pemikiran dalam penjelasan penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



2.4 HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian teoritis, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut ;

H_1 : Pemahaman *good governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor.

H_2 : Independensi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas yang bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. Penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman *Good Governance* dan Independensi terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi pada Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan) ini dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan data tertulis dengan melakukan observasi langsung dan membagikan kuesioner pada lokasi penelitian, yaitu di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan. Cara tersebut dianggap cukup praktis bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

3.2 TEMPAT DAN WAKTU

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar. Sedangkan waktu penelitian sampai dengan tahap perampungannya diperkirakan selama kurang lebih satu bulan.

3.3 TEKNIK PENENTUAN SAMPEL

3.3.1 Populasi

Sugiyono (1999:38) menyebutkan bahwa “populasi adalah semua nilai, baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kualitatif maupun kuantitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas”.

Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3.2 Sampel

Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Terdapat beberapa alasan untuk melakukan penyamplingan antara lain :

- a. Biaya yang murah, dalam hal ini manfaat ekonomi yang diambil dari penarikan sampel dibanding dengan sensus berkaitan dengan masalah uang/biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk sensus lebih besar dibandingkan menggunakan sampel.
- b. Akurasi yang lebih baik, kualitas studi jauh lebih baik menggunakan sampling dibandingkan dengan sensus. Sampling mempunyai kemungkinan pengujian wawancara yang lebih baik dari seluruh penyelidikan yang berkaitan dengan kegagalan, kesalahan, atau informasi yang mencurigakan, subversi dan proses yang lebih baik.
- c. Kecepatan pengumpulan data, kecepatan waktu penyamplingan ditentukan berdasarkan ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
- d. Ketersediaan elemen-elemen populasi, beberapa situasi mengharuskan penyamplingan. Penyamplingan merupakan keputusan yang memungkinkan jika populasi tak terbatas (banyak).

Pada penelitian ini tidak seluruh populasi yang diambil, mengingat jumlah yang banyak dan belum tentu diketahui secara pasti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel dipilih dari para auditor yang bekerja di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan yang berjumlah 141 orang yang diwakili oleh 50 auditor sebagai responden pada kantor tersebut. Teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* (sampling pertimbangan) yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti. Teknik penentuan sampling ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kerja auditor BPKP yang sebagian besar bertugas untuk mengaudit diluar kota Makassar.

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada auditor yang bekerja pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.4.2 Sumber Data

Data berasal dari jawaban yang telah diisi oleh para auditor yang bekerja di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jenis-jenis dari sumber data, yaitu :

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat di mana penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.
- b) Data sekunder, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sebagai suatu penelitian empiris maka data

sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu.

3.4.3 Pengumpulan Data

- 1) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sehubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban diberikan nilai (*scor*). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Makassar.
- 2) Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan literatur tentang *auditing* yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- 3) Mengakses *website* dan situs-situs, yaitu metode ini digunakan untuk mencari *website* maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

3.5 INSTRUMEN PENELITIAN

Teknik penyusunan kuesioner adalah berdasarkan pada hasil observasi dari auditor yang bekerja di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Baik pada auditor yang telah berpengalaman ataupun yang masih kurang berpengalaman sebagai auditor.

3.6 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu *Good governance* (X_1), dan independensi (X_2) yang merupakan faktor-faktor dari kinerja auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan dan satu variabel dependen yaitu kinerja auditor (Y).

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, definisi operasional variabel untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja auditor adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu (Trisnarningsih, 2007).
2. *Good Governance* adalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, *equitable*, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008).
3. Independensi adalah suatu standar *auditing* yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun (*The CPA Handbook* dalam tesis Kasidi, 2007:28).

3.7 TEKNIK ANALISIS

3.7.1 Teknik Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan instrumen pengukuran pengaruh pemahaman *good governance*, dan independensi terhadap kinerja auditor. Hal ini diukur melalui pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner dan menggunakan *likert scale* dengan skala 1 sampai 5. Dengan menggunakan kuesioner maka auditor harus mengisi jawaban yang dianggap paling tepat dengan skala *likert* berdimensi 5 skala sebagai berikut :

Tabel 3.2
Bobot Penilaian

Jawaban	Penilaian (Skor)
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (ST)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

3.7.2 Analisis Deskriptif

Metode data yang digunakan peneliti untuk menganalisa data adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode ini merupakan pencatatan yang disertai angka-angka yang merupakan nilai dan dapat memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang dianalisis. Pengujian tersebut dibantu dengan

menggunakan program *Statistical Product and Service for windows version 20.00* (SPSS versi 20).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum angka dianalisis lebih lanjut maka terlebih dahulu akan diuji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinieritas, yaitu :

1) Uji Normalitas

Normalitas berguna untuk mengetahui variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan dua metode pengujian yaitu *p-plot* dan diagram histogram.

Jika data ternyata tidak berdistribusi normal, analisis non parametrik termasuk model-model regresi yang digunakan. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model pengamatan regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, tidak heterokedastitas.

3) Uji Multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi linier antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan

menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10.

3.7.4 Uji Kualitas Data

Sebelum data dianalisis lebih lanjut maka terlebih dahulu akan diuji validitas dan reliabilitas, yaitu :

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Karena instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner maka uji validitas data dilakukan dengan uji validitas isi. Uji validitas isi adalah suatu alat yang mengukur sejauh mana kuesioner atau alat ukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai kerangka konsep. Pengujian validitas isi dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item-total correlation*. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r hitung lebih besar dibandingkan koefisien korelasi r tabel pada taraf signifikansi 5% atau 10%.

2. Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Butir pernyataan dikatakan handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten. Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur itu mantap dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan, dan dapat diramalkan. Pengujian realibilitas dengan menggunakan *cronbach*

α (). Koefisien *cronbach alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

3.8 UJI HIPOTESIS

3.8.1 Uji Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel terikat terhadap variabel bebas digunakan persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu *Statistical Product and Service Solution for windows version 20,00* (SPSS versi 20). Persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan dua variabel independen, yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2$$

Keterangan :

Y : Kinerja Auditor

a : Konstanta

b₁ : Koefisien Regresi *Good Governance*

X₁ : *Good Governance*

b₂ : Koefisien Regresi Independensi

X₂ : Independensi

3.8.2 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, yaitu menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut :

- a) H_0 : $\beta = 0$, *Good Governance*, dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

- b) H_a : $\neq 0$, *Good Governance*, dan independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t_{tabel} . Untuk menentukan nilai t_{tabel} , maka ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$ maka H_0 ditolak.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$ maka H_0 diterima.

Selain itu uji t tersebut dapat pula dilihat dari besarnya *probabilitas value (p-value)* dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi = 5%). Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah :

- a. Jika $p-value < 0,05$ maka H_0 ditolak.
- b. Jika $p-value > 0,05$ maka H_0 diterima.

3.8.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji F menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F, yaitu :

- a) H_0 : $= 0$, *Good Governance* dan, independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.
- b) H_a : $\neq 0$, *Good Governance*, dan independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 5% dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n-k-1)$ di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria yang digunakan adalah :

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel} (n-k-1)$ maka H_0 ditolak.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel} (n-k-1)$ maka H_0 diterima.

Selain itu uji F dapat pula dilihat dari besarnya *probabilitas value (p-value)* dibandingkan dengan 0,05 (Tarf signifikansi = 5%). Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah :

- a. Jika $p-value < 0,05$ maka H_0 ditolak.
- b. Jika $p-value > 0,05$ maka H_0 diterima.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (*Regering Accountantsdienst*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan

anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi,

asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai *good governance*.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Dengan visi ini, BPKP menegaskan akan tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat preemptive. Apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif non justisia. Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan (fraud). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK, sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.

Sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bpkp;
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan :

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;

- d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 1. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
 2. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
 3. Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
 4. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan bpkp sendiri maupun hasil pengawasan badan pemeriksa keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Kegiatan BPKP dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu :

1. Audit, yaitu mencakup :
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - b) Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/D/Badan Usaha Lainnya.
 - c) Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.
 - d) Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP).
 - e) Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - f) Dana *Off Balance Sheet* BUMN maupun Yayasan yang terkait.

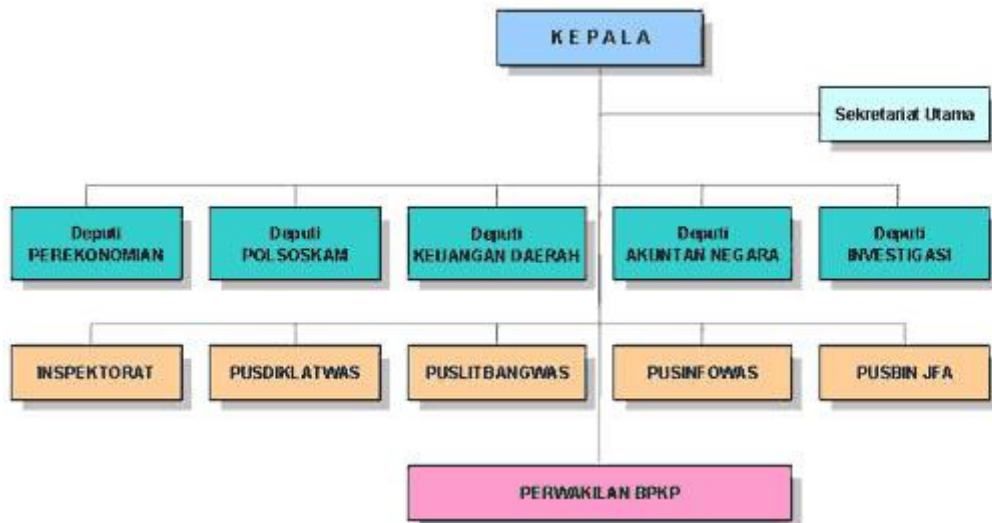
- g) Dana *Off Balance Budget* pada Departemen/LPND.
 - h) Audit Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Pemeriksaan.
 - i) Audit Khusus (Audit Investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang hal itu membutuhkan keahlian di bidangnya.
 - j) Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan urgen untuk segera dilakukan.
2. Konsultasi, asistensi dan evaluasi, yaitu BPKP berperan sebagai konsultan bagi para *stakeholders* menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
 3. Pemberantasan KKN, yaitu BPKP membantu pemerintah memerangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensik. Dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan KKN, BPKP telah mengikat kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama. BPKP juga mengikat kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. BPKP tergabung dalam Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) bersama-sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian (yang telah selesai masa tugasnya).
 4. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, yaitu BPKP menjadi instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah. Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor. Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP berperan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah.

Dalam menjalankan fungsinya, BPKP memiliki susunan organisasi sebagaimana terlihat dalam bagan Struktur Organisasi. BPKP dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh satu Sekretaris Utama dan lima Deputi yang membawahi bidangnya masing-masing, yaitu Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi Bidang Akuntan Negara, dan Deputi Bidang Investigasi. Selain itu, terdapat empat Pusat yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya mempunyai Kantor Perwakilan di 33 Provinsi seluruh Indonesia. BPKP telah mengembangkan kapasitas SDM-nya melalui peningkatan kompetensi *performance audit, policy evaluation, audit process enhancement, human resources management, dan corruption investigation* yang pelaksanaannya mendapat bantuan dari ADB melalui Loan Nomor 1620-INO. Selain itu, setiap pejabat BPKP harus di-assess melalui Assessment Centre BPKP guna penilaian kompetensi pejabat yang bersangkutan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



4.2 DESKRIPSI DATA

Data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel, yaitu di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan kurang lebih satu minggu dengan melakukan dua kali pengambilan data, yaitu dari tanggal 5-12 April 2013. Saat pengembalian kuesioner, seluruhnya kembali dan tidak terdapat kuesioner yang cacat ataupun hilang. Adapun rincian pendistribusian kuesioner tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Rincian Penyebaran Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	(%)
1.	Distribusi Kuesioner	50	100%
2.	Kuesioner kembali	50	100%
3.	Kuesioner yang cacat/tidak dapat diolah	0	0%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	50	100%
<i>n</i> sampel yang kembali = 50			
<i>Responden Rate</i> = (50/50) x 100% = 100%			

Sumber : Data Primer (2014)

4.3 KARAKTERISTIK RESPONDEN

4.3.1 Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi (orang)	(%)
Laki-laki	35	70%
Perempuan	15	30%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Primer (2014)

Berdasarkan tabel 4.2 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 35 orang (70%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 15 orang atau 30%. Dari angka tersebut menggambarkan bahwa pegawai didominasi oleh laki-laki yang bekerja sebagai auditor dari jumlah sampel yang ada.

4.3.2 Umur

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia	Frekuensi (orang)	(%)
20-30 tahun	29	58%
31-40 tahun	11	22%
41-50 tahun	7	14%
51-60 tahun	3	6%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Primer (2014)

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 50 orang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 29 orang atau 58%, 31-40 tahun sebanyak 11 orang atau 22%, 41-50 tahun sebanyak 7 orang atau 14% dan 51-60 sebanyak 3 orang atau 6%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja sebagai auditor berumur antara 20-30 tahun.

4.3.3 Pendidikan

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir	Jumlah	(%)
SMA/ sederajat	0	0%
Diploma (D3)/Sarjana Muda	27	54%
Sarjana/Magister	23	46%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Primer (2014)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir, yaitu SMA/Sederajat sebanyak 0 orang atau 0%, Diploma (D3) atau Sarjana Muda sebanyak 27 orang atau 54%, dan Sarjana/Magister

sebanyak 23 atau 46%. Pendidikan terakhir pegawai yang mendominasi pada instansi tersebut ialah Diploma/Sarjana Muda sebanyak 27 orang atau 54%.

4.3.4 Masa Kerja

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	(%)
< 5 tahun	27	54%
5-10 tahun	9	18%
11-15 tahun	3	6%
16-20 tahun	2	4%
> 20 tahun	9	18%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Primer (2014)

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden yang memiliki lama bekerja < 5 tahun sebanyak 27 orang atau 54%, 5-10 tahun sebanyak 9 orang atau 18%, 10-15 tahun sebanyak 3 orang atau 6%, 15-20 tahun sebanyak 2 orang atau 4% dan > 20 tahun sebanyak 9 orang atau 18%. Dari hasil tabel di atas, maka auditor BPKP didominasi oleh auditor dengan masa kerjanya di < 5 tahun.

4.4 ANALISIS DESKRIPTIF

Analisis statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi (SD). Pada penelitian ini menggunakan variabel *good governance* dan independensi untuk kinerja auditor sebagai variabel dependen. Pada tabel 4.6 menunjukkan hasil statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS 20, sebagai berikut :

Tabel 4.6
Deskriptif Pervariabel

Variabel	Teoritis		Sesungguhnya		
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	SD
Independensi	6-30	18	18-28	23,34	1,923
Good Governance	5-30	16	18-30	25,62	2,594
Kinerja Auditor	6-30	18	17-28	22,66	2,868

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2014)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk ukuran variabel independensi dari 50 responden. Variabel independensi terdiri dari 6 pernyataan yang diukur dengan skala *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran aktual) sebesar 18-28 dengan kisaran teoritisnya 6-30. Nilai *mean* dan median untuk variabel independensi masing-masing sebesar 23,34 dan 18. Hal ini mengindikasikan bahwa independensi cukup mempengaruhi kinerja auditor. Variabel independensi mempunyai standar deviasi sebesar 1,923.

Variabel *good governance* terdiri dari 5 pernyataan yang diukur dengan skala *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran aktual) sebesar 18-30 dengan kisaran teoritisnya 5-20. Nilai *mean* dan median untuk variabel *good governance* masing-masing sebesar 25,62 dan 18. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat tata kelola *good governance* dari responden yang cukup baik di dalam BPKP. Standar deviasi untuk variabel *good governance* ini adalah sebesar 2,594.

Variabel yang terakhir adalah kinerja auditor terdiri dari 6 pernyataan yang diukur dengan skala *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran aktual) sebesar 17-28 dengan kisaran teoritisnya 18-30. Nilai *mean* dan median untuk variabel kinerja auditor masing-masing sebesar 22,66 dan 18. Hal

ini mengindikasikan bahwa kinerja auditor dari responden cukup tinggi di BPKP. Standar deviasi untuk variabel kinerja auditor ini adalah sebesar 8,229.

4.5 UJI KUALITAS DATA

4.5.1 Uji Validitas

Pengujian validitas isi dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item-total correlation*. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r_{hitung} lebih besar dibandingkan koefisien korelasi r_{tabel} pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 4.7
Uji Validitas Data

No	Indikator	Item	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Keterangan
1.	Indenpedensi (X ₁)	X _{1.1}	0,483	0,279	Valid
		X _{1.2}	0,498	0,279	Valid
		X _{1.3}	0,487	0,279	Valid
		X _{1.4}	0,346	0,279	Valid
		X _{1.5}	0,449	0,279	Valid
		X _{1.6}	0,529	0,279	Valid
2.	Good Governance (X ₂)	X _{2.1}	0,292	0,279	Valid
		X _{2.2}	0,583	0,279	Valid
		X _{2.3}	0,518	0,279	Valid
		X _{2.4}	0,860	0,279	Valid
		X _{2.5}	0,849	0,279	Valid
3.	Kinerja Auditor (Y)	Y1	0,688	0,279	Valid
		Y2	0,336	0,279	Valid
		Y3	0,344	0,279	Valid
		Y4	0,454	0,279	Valid
		Y5	0,669	0,279	Valid
		Y6	0,849	0,279	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2014)

Dari tabel 4.7 uji validitas memperlihatkan nilai r_{hitung} variabel independensi dan *good governance* terhadap kinerja auditor lebih besar

dibanding nilai r_{tabel} . Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh variabel independensi dan *good governance* terhadap kinerja auditor dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

4.5.2 Uji Realibilitas

Suatu angket kuesioner dinyatakan reliabel apabila jawaban terhadap responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas adalah *cronbach alpha* dengan cara membandingkan nilai *alpha* dengan standarnya. Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur itu mantap dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Koefisien *cronbach alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengujian realibilitas dengan menggunakan alat bantu SPSS 20.00 *for windows*.

Tabel 4.8
Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Independensi (X_1)	0,672	0.60	Reliabel
<i>Good Governance</i> (X_2)	0,766	0.60	Reliabel
Kinerja Auditor (X_3)	0,749	0.60	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2014)

Hasil nilai *cronbach's alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan variabel atau kuesioner yang digunakan variabel

independensi dan *good governance* terhadap kinerja auditor dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.6 DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN

Deskripsi penelitian adalah hasil penelitian yang menjelaskan mengenai pengaruh independensi dan *good governance* terhadap kinerja auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tanggapan auditor sebagai responden dalam memberikan informasi terhadap pertanyaan kuesioner yang diajukan sesuai tingkat substansi pemahaman responden. Variabel bebas (X) adalah independensi dan *good governance*. Sedangkan sebagai variabel terikat (Y) adalah kinerja auditor. Berikut akan diuraikan deskripsi variabel penelitian dibawah ini :

1. Independensi (X_1)

Independensi merupakan sikap tidak memihak. Independensi adalah salah satu faktor yang menentukan kredibilitas pendapat seorang auditor. Untuk jelasnya dapat dilihat tanggapan responden pada Tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9
Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden
Mengenai Independensi

Kategori	Interval	Frekuensi (Orang)	(%)
Sangat Setuju	4.01 – 5.00	15	30%
Setuju	3.01 – 4.00	29	58%
Ragu-Ragu	2.01 – 3.00	6	12%
Tidak Setuju	1.01 – 2.00	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0.00 – 1.00	0	0%
Total		50	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2014)

Berdasarkan data Tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden umumnya menyatakan sangat setuju dan setuju. Responden auditor yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang atau 30% dan yang menyatakan setuju sebanyak 29 orang atau 58%. Terlihat ada 6 orang atau 12% auditor memberikan tanggapan ragu-ragu. Ini berarti masih terdapat beberapa orang auditor yang memperoleh independensi yang kurang, sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja auditor tersebut.

2. *Good Governance* (X_2)

Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Untuk jelasnya dapat dilihat tanggapan responden pada Tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10
Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden
Mengenai *Good Governance*

Kategori	Interval	Frekuensi (Orang)	(%)
Sangat Setuju	4.01 – 5.00	27	54%
Setuju	3.01 – 4.00	22	44%
Ragu-Ragu	2.01 – 3.00	1	2%
Tidak Setuju	1.01 – 2.00	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0.00 – 1.00	0	0%
Total		50	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2014)

Berdasarkan data Tabel 4.10 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden umumnya menyatakan sangat setuju dan setuju. Responden auditor yang menyatakan sangat setuju sebanyak 27 orang atau 54% dan yang menyatakan setuju sebanyak 22 orang atau 44%. Terlihat ada 1 orang atau 2% auditor memberikan tanggapan ragu-ragu. Ini berarti masih terdapat auditor yang memiliki *good governance* yang kurang baik dalam menjalankan

tugasnya sebagai auditor, sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja auditor tersebut.

3. Kinerja Auditor (Y)

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Untuk jelasnya dapat dilihat tanggapan responden pada Tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11
Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden
Mengenai Kinerja Auditor

Kategori	Interval	Frekuensi (Orang)	(%)
Sangat Setuju	4.01 – 5.00	20	40%
Setuju	3.01 – 4.00	27	54%
Ragu-Ragu	2.01 – 3.00	3	6%
Tidak Setuju	1.01 – 2.00	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0.00 – 1.00	0	0%
Total		50	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2014)

Berdasarkan data Tabel 4.11 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden umumnya menyatakan sangat setuju dan setuju. Responden auditor yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang atau 40% dan yang menyatakan setuju sebanyak 27 orang atau 54%. Terlihat ada 3 orang atau 6% auditor memberikan tanggapan ragu-ragu. Ini berarti masih terdapat auditor yang memiliki kinerja yang kurang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Ini menunjukkan bahwa BPKP sudah mengupayakan untuk dapat meningkatkan kinerja auditornya, yang terlihat dari lebih dominannya auditor yang memiliki kinerja yang baik walaupun masih terdapat tiga orang auditor yang memiliki kinerja yang kurang, hal ini mungkin disebabkan auditor

yang bersangkutan masih kurang memiliki pengalaman dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Sehingga masih perlu adanya sosialisasi antara diri dan lingkungan kerjanya.

4.7 UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode Kolmogorov Smirnov maupun pendekatan grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Nilai probabilitas $> 0,05$, maka hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal.
- b. Nilai probabilitas $< 0,05$, maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.

Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan program SPSS versi 20. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			50
Normal Parameters	a,b	Mean	,0000000
		Std. Deviation	1,13045155
Most Extreme Differences		Absolute	,067
		Positive	,048
		Negative	-,067
Kolmogorov-Smirnov Z			,606
Asymp. Sig. (2-tailed)			,856

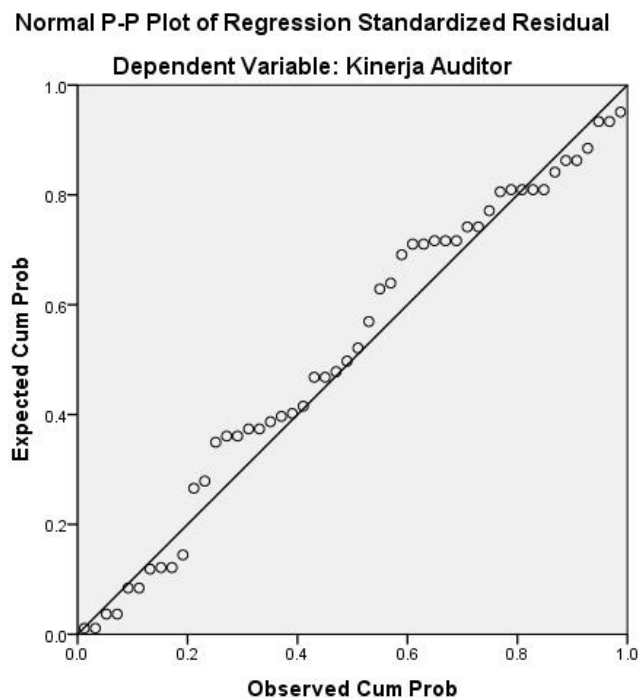
- a. Test distribution is Normal
- b. Calculated from data

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2014)

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar $0,856 > 0,05$. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

2. Uji heteroskedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model pengamatan regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, tidak heterokedastitas.

Gambar 4.2
Scatterplot



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2014)

Berdasarkan data dalam gambar 4.2 di atas tampak bahwa grafik *scatterplots* menunjukkan titik-titik tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol (0) pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa

dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi adanya heterokedastisitas, sehingga model regresi ini layak untuk memprediksi kinerja auditor berdasarkan dua variabel independennya, yaitu independensi dan *good governance*.

3. Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi linier antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10. Sebagai berikut.

Tabel 4.13
Uji Multikolinearitas

<i>Collinearity Statistics</i>		
Variabel	Tolerance	VIF
Independensi (X_1)	0,693	1,443
<i>Good Governance</i> (X_2)	0,701	1,426

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2014)

Hasil perhitungan nilai VIF pada *full model* menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF > 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada *full model* regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas.

4.8 PENGUJIAN HIPOTESIS

4.8.1 Pengaruh Pemahaman *Good Governance* terhadap Kinerja Auditor

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “pemahaman *good governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor”. Untuk menguji hipotesis tersebut, maka digunakan uji t.

Uji t untuk menguji kemaknaan atau keberartian koefisien regresi partial. Pengujian melalui uji t adalah dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf nyata $\alpha = 0.05$. Uji t berpengaruh signifikan apabila hasil perhitungan t_{hitung}

lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) atau probabilitas kesalahan lebih kecil dari 5% ($p < 0.05$). Selanjutnya akan dicari nilai koefisien determinasi parsial (r^2) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) secara parsial terhadap variabel terikat (Y). Lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel 4.14 disajikan hasil perhitungan uji t dan koefisien determinasi parsialnya sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Perhitungan Uji-t untuk Variabel *Good Governace*

Variabel	Koefisien Regresi	T		Sig	Konst.	Ket.
		t_{hitung}	t_{tabel}			
<i>Good governance</i>	0,704	4,379	2,013	0,000	10,754	Signifikan
p < 0,05 atau 5%						

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2014)

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil uji-t di atas dapat diketahui bahwa $t_{hitung} X_1 = 4.379$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,013$ pada taraf kesalahan 5% atau $p < 0.05$. Ini menunjukkan bahwa variabel *good governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *good governance* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, dengan demikian hipotesis pertama diterima yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang menunjukkan bahwa pemahaman *good governance* terhadap peningkatan kinerja auditor.

4.8.2 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “independensi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor”. Untuk menguji hipotesis kedua, dipakai cara yang sama dengan pengujian hipotesis pertama, yaitu dengan menggunakan uji-t.

pada tabel 4.15 disajikan hasil perhitungan uji t dan koefisien determinasi parsialnya, sebagai berikut :

Tabel 4.15
Hasil Perhitungan Uji-t untuk Variabel Independensi

Variabel	Koefisien Regresi	T		Sig	Konst.	Ket.
		t _{hitung}	t _{tabel}			
Independensi	-0,262	-1,210	2,013	0,232	10,754	Signifikan
p < 0,05 atau 5%						

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2014)

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil uji-t di atas dapat diketahui bahwa $t_{hitung} X_1 = -1,210$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 2,013$ pada taraf kesalahan 5% atau $p < 0.05$. Ini menunjukkan bahwa variabel independensi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, dengan demikian hipotesis kedua ditolak yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak yang menunjukkan bahwa masih kurangnya sikap independensi terhadap peningkatan kinerja auditor.

4.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, digunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menelaah pembuktian analisis kuantitatif.

Pembuktian ini dimaksudkan untuk menguji variasi dari model regresi yang digunakan dalam menerangkan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat

(Y) dengan cara menguji kemaknaan dari koefisien regresinya. Hasil perhitungan dengan menggunakan model regresi penuh (*Full Model Regression*) diperoleh dengan nilai koefisien regresi pengaruh pemahaman *good governance* dan independensi terhadap kinerja auditor.

Tabel 4.16
Rangkuman Hasil Uji-F Analisis Regresi Berganda
(*Full Model Regression*)

Variabel Regresi	Koefisien Regresi	R	R Square	F _{hitung}	F _{table}	Sig.	Constanta (Y)
Independensi (X ₁)	-0,262	0,559	0,312	10,654	3,20	0,000	10,754
<i>Good governance</i> (X ₂)	0,704						

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2014)

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan program SPSS menggunakan *Full Model Regression* diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 10.754 + -0.262X_1 + 0.704X_2$$

1. Persamaan regresi di atas terdapat nilai β_0 atau nilai konstanta sebesar 1.398. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka independensi dan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja auditor sebesar 10,754. Selain itu persamaan regresi linier berganda di atas, terdapat nilai koefisien regresi variabel bebas X adalah positif. Nilai koefisien X yang positif artinya apabila terjadi perubahan pada variabel X, maka akan menyebabkan perubahan secara searah pada variabel Y.
2. Koefisien Regresi X₁ (independensi) sebesar -0,262 yang berarti bahwa jika X₁ (independensi) yang diberikan naik sebesar satu satuan, akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan motivasi kerja auditor sebesar -0.262 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

3. Koefisien Regresi X_2 (*good governance*) sebesar 0,704 yang berarti bahwa jika X_2 (*good governance*) naik sebesar satu satuan, akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan motivasi kerja auditor sebesar 0,704 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

Analisis dari uji F ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis pertama yaitu “pemahaman *good governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor” dan hipotesis kedua yaitu “independensi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor”.

Uji statistik F atau uji signifikansi simultan, pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang positif secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Uji F mempunyai pengaruh signifikan apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau probabilitas kesalahan kurang dari 5% ($P < 0,05$).

Dari hasil perhitungan analisis *Full Model Regression* dengan bantuan program SPSS diperoleh F_{hitung} sebesar 10,654 dengan tingkat probabilitas 0.000 (signifikan). Sedangkan F_{tabel} sebesar 3,20 dengan demikian maka F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($10,654 > 3,20$) dan juga probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, berarti bahwa hipotesis pertama dan kedua dari penelitian ini dapat diterima kebenarannya.

Besarnya pengaruh (kontribusi) variabel bebas (X) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Y) dapat dilihat dari besarnya koefisien determinan ganda (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan semakin besar (mendekati 1), maka dapat dikatakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya semakin besar. Atau dengan kata lain, jika nilai yang mendekati satu berarti

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan semakin kecil (mendekati 0), maka dapat dikatakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Atau dengan kata lain, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Pada Tabel 4.16 hasil pengujian hipotesis pertama dan kedua menunjukkan bahwa independensi dan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai kontribusi R sebesar 55,9% dan R^2 sebesar 28,3%, menjelaskan bahwa peningkatan kinerja auditor ditentukan oleh sikap independensi dan pemahaman tata kelola (*good governance*).

4.9 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.9.1 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Auditor

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, yaitu pemahaman *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Ini berarti bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah mampu menerapkan *good governance* yang baik bagi auditor-auditornya dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia jasa, sehingga auditor-auditornya pun menghasilkan kinerja yang baik pula bagi perusahaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Trisnaningsih (2007), Noveri (2010), dan Purba (2013) dimana penerapan *good governance* ini berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja auditor.

4.9.2 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, yaitu independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Ini berarti bahwa auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang mempertahankan sikap independensinya sebagai auditor sehingga menyebabkan kinerja yang kurang baik untuk BPKP.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Trisnarningsih (2007), Noveri (2010), Purba (2013), dan Sapariyah (2011), dimana dalam penelitiannya independensi auditor berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja auditor.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan dan diolah, maka disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa auditor pemerintah dalam hal ini auditor pada kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki pemahaman yang baik tentang *good governace*, akan lebih menunjang karir mereka sebagai auditor. Mengetahui dan menerapkan pemahaman *good governance* dalam melaksanakan tugas sebagai auditor pemerintah akan meningkatkan kinerja seorang auditor pemerintah.
2. Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa pada kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang memiliki sikap independensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor pemerintah. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh banyaknya auditor BPKP yang baru saja lulus dari sekolah mereka, sehingga masih kurangnya pengalaman dan keahlian dalam menjalankan tugas mereka sebagai auditor pemerintah.

5.2 SARAN

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan, yaitu :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian dan tidak hanya di auditor pemerintah pada BPKP saja, tetapi dapat dilakukan pada

auditor pemerintah di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Inspektorat Kota, atau Inspektorat Provinsi, dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

2. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan pada auditor internal pada perusahaan atau pada akuntan publik yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian pada auditor pemerintah dapat menambahkan variabel etika, keahlian (kompetensi), akuntabilitas, atau motivasi sehingga hasil dari penelitian akan lebih meluas dari penelitian sebelumnya dan dapat fokus meneliti terhadap kinerja auditor atau kualitas auditor dengan menggunakan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian sekarang.
4. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian auditor pemerintah yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk auditor secara keseluruhan.
2. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan kuesioner, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang tidak cermat, tidak serius, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, Randal J.E dan Mark S.B. 2003. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi, Pendekatan Terpadu*. Jilid 1, Edisi Kesembilan. Jakarta: penerbit PT. Indeks.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2008. *Kode Etik Dan Standar Audit*. Edisi Kelima. Bogor : Pusdiklat BPKP.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Fadilah, Sri. 2013. *The Influence of Good Governance Implementation to Organization Performance : Analysis of Factors Affecting (Study on Intitution Amil Zakat Indonesia)*. The International Journal of Social Sciences. 30th January 2013 Vol. 7 No. 1-ISSN 2305-4557. Bandung : Program Studi Akuntansi Unisba.
- Gaffar, Affan. 2001. Etika birokrasi dan *Good Governance*. Makalah. Jakarta
- IAI. 2005. Standar Profesi Akuntan Publik. Jakarta : Salemba Empat
- Kalbers, Lawrence P. dan Fogarty, Timothy J. 1995. Professionalism Its Consequences: A Study of Internal Auditors. *Auditing: A Journal of Practice*. Vol. 14. No. 1: 64-86
- Kasidi. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Larkin, Joseph M. 1990. *Does Gender affect Internal auditors performance? The Women CPA*, Spring: 20-24, Australia.
- Luthans, Fred. 2002. *Organizational Behavior*. ninth Edition. New York: McGraw-Hill. Inc.

- Mahsun, Mohammad, Firma Sulistyowati, dan Heribertus A.P. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Martina, Komplang. 2013. *Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1 (2013) : 39-53-ISSN : 2302-8556. Bali : Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi keenam. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Noveri, Helsa. 2010. *Pengaruh pemahaman Good Governance dengan independensi auditor, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dengan komitmen organisasi sebagai mediasi terhadap kinerja auditor internal*. Tesis. Padang: Program pascasarjana, universitas Andalas.
- Purba, Irwandi. 2013. *Pengaruh independensi, komitmen organisasi, pemahaman Good Governance, dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah BPKP Riau*. Skripsi. Riau: Program studi Akuntansi, universitas Riau.
- Robbins, Stephen. 2001. *Prilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Prenhallindo
- Sapariyah, Rina Ani. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Independensi Auditor terhadap Kinerja auditor dan Komitmen Organsisasi. Survey pada KAP di Surakarta*. Skripsi. Surakarta: STIE AUB Surakarta
- Sekretariat Pengembangan *Good Public Governance*. 2002. <http://ainulsmoothy.blogspot.com/2013/03/pemahaman-prinsip-prinsip-good.html>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2014 pukul 12.15 wita
- Soegiasuti, Janti. 2005. *Persepsi Masyarakat Terhadap Independensi Auditor Dalam Penampilan (Studi Empiris Pada Analis Kredit BKK Jawa Tengah)*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi UNDIP.
- Supriyono, R.A. 1988. *Pemeriksaan Akuntan (Auditing) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Trisnaningsih, Sri, 2007. *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor*. Simposium Akuntansi Nasional X, 26 – 28 Juli 2007, Makassar.

Tim Penyusun. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Edisi Pertama. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Widyananda, Herman. 2008. *Revitalisasi Peran Internal Auditor Pemerintah Untuk Penegakan Good Governance di Indonesia*. Publikasi, Seminar, makalah, dan Sambutan. Universitas Padjadjaran.

<http://adyakuntansi.blogspot.com/2012/09/independensi-dalam-audit.html>. Diakses pada tanggal 23 Mei pukul 12.30 wita

<http://zetzu.blogspot.com/2011/11/independensi-audit.html>. Diakses pada tanggal 23 Mei pukul 12.35 wita

<http://jabresman.blogspot.com/2009/06/independensi-meningkatkan-kepercayaan.html>. Diakses pada tanggal 23 Mei pukul 12.45 wita

http://www.banyumaskab.go.id/berita/berita_detail/246. Diakses pada tanggal 23 Januari 2014 pukul 12.20 wita

<http://www.google.com/UNESCAP/What-Good-Governance.html>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2014 pukul 21.45 wita

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUESIONER

Nama	:	(boleh tidak diisi)
Jenis Kelamin	:	Pria / Wanita	
Umur	:	1. 20 s/d 30 tahun 3. 41 s/d 50 tahun 2. 31 s/d 40 tahun 4. 51 s/d 60 tahun	
Pendidikan	:	1. SMA / Sederajat 2. Diploma / Sarjana Muda 3. Sarjana / Magister	
Masa Kerja	:	1. Dibawah 5 tahun 4. 16 s/d 20 tahun 2. 5 s/d 10 tahun 5. Lebih dari 20 tahun 3. 11 s/d 15 tahun	

Daftar Pertanyaan :

Mohon Bapak/Ibu, saudara(i) memberi tanda *checklist* () pada kolom (antara 1-5), sesuai dengan skala yang menurut anda paling mendekati.

Keterangan :

SS : Jika pernyataan tersebut **Sangat Setuju** dengan diri anda.

S : Jika pernyataan tersebut **Setuju** dengan diri anda.

RR : Jika pernyataan tersebut **Ragu-Ragu** dengan diri anda.

TS : Jika pernyataan tersebut **Tidak Setuju** dengan diri anda.

STS : Jika pernyataan tersebut **Sangat Tidak Setuju** dengan diri anda.

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
Kinerja Auditor (Y)						
1.	Semakin tinggi tingkat pendidikan auditor, maka kinerjanya semakin profesional.					
2.	Auditor yang mempunyai pengalaman cukup lama dalam bidangnya, maka kinerjanya semakin baik dan profesional.					
3.	Faktor usia sangat mempengaruhi kinerja auditor dalam melaksanakan profesinya.					
4.	Auditor sebaiknya berlangganan dan membaca secara sistematis jurnal <i>auditing</i> dan publikasi lainnya untuk lebih meningkatkan pengetahuannya.					
5.	Pekerjaan yang saya lakukan memotivasi saya untuk berbuat yang terbaik sebagai auditor.					
6.	Saya merasa puas dengan bidang pekerjaan saya saat ini.					

Sumber : Sri Trisnangsih (2007)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
Independensi (X₁)						
1.	Penyusunan program audit bebas dari campur tangan pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa.					
2.	Pemeriksaan langsung dan bebas mengakses semua buku-buku, catatan-catatan, pejabat dan karyawan perusahaan, serta sumber informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan, kewajiban-kewajiban, dan sumber-sumber bisnis.					
3.	Pemeriksaan bebas dari kepentingan pribadi atau hubungan yang membatasi pemeriksaan pada kegiatan catatan, orang-orang tertentu yang seharusnya tercakup dalam pemeriksaan.					
4.	Pelaporan bebas dari perasaan kewajiban untuk memodifikasi pengaruh fakta-fakta yang dilaporkan pada pihak tertentu.					
5.	Pelaporan menghindari bahasa atau istilah-istilah yang mendua arti secara sengaja atau tidak dalam pelaporan fakta-fakta, pendapat, rekomendasi, serta dalam penafsirannya.					
6.	Penyusunan program audit bebas dari campur tangan atau suatu sikap tidak mau bekerjasama mengenai penerapan prosedur yang dipilih.					

Sumber : Nurul Arifah (2012)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
Good Governance (X₂)						
1.	Auditor dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap independen dan menegakkan keadilan terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri.					
2.	Auditor harus transparansi terhadap informan laporan keuangan klien yang diaudit.					
3.	Selama melaksanakan pemeriksaan hendaknya seorang auditor harus bersikap adil dalam hal pembagian tugas antar sesama rekan kerja seprofesi, dan transparansi dalam hal pembagian <i>fee</i> antara <i>partner</i> , senior, dan junior auditor					
4.	Auditor dalam menjalankan tugasnya harus mempertahankan integritas, objektivitas, dan independensi.					
5.	Auditor dalam menjalankan profesinya harus mentaati aturan etika profesi.					

Sumber : Sri Trisnangsih (2007)

LAMPIRAN 2

DESKRIPTIF DATA

1. *Descriptives Independensi*

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1.1	50	3.00	2.00	5.00	176.00	3.5200	.86284	.744
X1.2	50	3.00	2.00	5.00	192.00	3.8400	.61809	.382
X1.3	50	2.00	3.00	5.00	204.00	4.0800	.56569	.320
X1.4	50	4.00	1.00	5.00	193.00	3.8600	.67036	.449
X1.5	50	2.00	3.00	5.00	205.00	4.1000	.46291	.214
X1.6	50	3.00	2.00	5.00	197.00	3.9400	.68243	.466
Valid N (listwise)	50							

2. *Descriptives Good Governance*

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X2.1	50	3.00	5.00	215.00	4.3000	.58029
X2.2	50	2.00	5.00	198.00	3.9600	.69869
X2.3	50	3.00	5.00	210.00	4.2000	.57143
X2.4	50	3.00	5.00	221.00	4.4200	.53795
X2.5	50	3.00	5.00	219.00	4.3800	.53031
Good Governance	50	18.00	30.00	1281.00	25.6200	2.59426
Valid N (listwise)	50					

3. *Descriptives Kinerja Auditor*

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Y1	50	3.00	2.00	5.00	180.00	3.6000	.83299	.694
Y2	50	3.00	2.00	5.00	191.00	3.8200	.69076	.477
Y3	50	3.00	2.00	5.00	162.00	3.2400	1.02140	1.043
Y4	50	3.00	2.00	5.00	201.00	4.0200	.74203	.551
Y5	50	2.00	3.00	5.00	200.00	4.0000	.60609	.367
Y6	50	3.00	2.00	5.00	199.00	3.9800	.65434	.428
Valid N (listwise)	50							

4. Descriptives All Variable

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Independensi	50	10.00	18.00	28.00	1167.00	23.3400	1.92311	3.698
Good Governance	50	12.00	18.00	30.00	1281.00	25.6200	2.59426	6.730
Kinerja Auditor	50	11.00	17.00	28.00	1133.00	22.6600	2.86862	8.229
Valid N (listwise)	50							

LAMPIRAN 3

FREKUENSI DATA

1. *Frequencies Independensi*

Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Independensi
N	Valid	50	50	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.5200	3.8400	4.0800	3.8600	4.1000	3.9400	23.3400
Median		4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	23.0000

Frequency Table

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	14.0	14.0	14.0
	3.00	15	30.0	30.0	44.0
	4.00	23	46.0	46.0	90.0
	5.00	5	10.0	10.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	4.0	4.0	4.0
	3.00	8	16.0	16.0	20.0
	4.00	36	72.0	72.0	92.0
	5.00	4	8.0	8.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	12.0	12.0	12.0
	4.00	34	68.0	68.0	80.0
	5.00	10	20.0	20.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.0	2.0	2.0
	2.00	2	4.0	4.0	6.0
	3.00	3	6.0	6.0	12.0
	4.00	41	82.0	82.0	94.0
	5.00	3	6.0	6.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	6.0	6.0	6.0
	4.00	39	78.0	78.0	84.0
	5.00	8	16.0	16.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	6.0	6.0	6.0
	3.00	4	8.0	8.0	14.0
	4.00	36	72.0	72.0	86.0
	5.00	7	14.0	14.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Independensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18.00	1	2.0	2.0	2.0
	21.00	6	12.0	12.0	14.0
	22.00	11	22.0	22.0	36.0
	23.00	9	18.0	18.0	54.0
	24.00	12	24.0	24.0	78.0
	25.00	6	12.0	12.0	90.0
	26.00	1	2.0	2.0	92.0
	27.00	2	4.0	4.0	96.0
	28.00	2	4.0	4.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

2. Frequencies *Good Governance*

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Good Governance
N	Valid	50	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4.3000	3.9600	4.2000	4.4200	4.3800	25.6200
Median		4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	25.0000

Frequency Table

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	6.0	6.0	6.0
	4.00	29	58.0	58.0	64.0
	5.00	18	36.0	36.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	6.0	6.0	6.0
	3.00	4	8.0	8.0	14.0
	4.00	35	70.0	70.0	84.0
	5.00	8	16.0	16.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	8.0	8.0	8.0
	4.00	32	64.0	64.0	72.0
	5.00	14	28.0	28.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	2.0	2.0	2.0
	4.00	27	54.0	54.0	56.0
	5.00	22	44.0	44.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	2.0	2.0	2.0
	4.00	29	58.0	58.0	60.0
	5.00	20	40.0	40.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Good Governance

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18.00	1	2.0	2.0	2.0
	22.00	2	4.0	4.0	6.0
	23.00	1	2.0	2.0	8.0
	24.00	20	40.0	40.0	48.0
	25.00	7	14.0	14.0	62.0
	26.00	1	2.0	2.0	64.0
	27.00	4	8.0	8.0	72.0
	28.00	4	8.0	8.0	80.0
	29.00	5	10.0	10.0	90.0
	30.00	5	10.0	10.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

3. Frequencies Kinerja Auditor**Statistics**

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Kinerja Auditor
N	Valid	50	50	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.6000	3.8200	3.2400	4.0200	4.0000	3.9800	22.6600
Median		4.0000	4.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	23.0000

Frequency Table

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	14.0	14.0	14.0
	3.00	10	20.0	20.0	34.0
	4.00	29	58.0	58.0	92.0
	5.00	4	8.0	8.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	8.0	8.0	8.0
	3.00	5	10.0	10.0	18.0
	4.00	37	74.0	74.0	92.0
	5.00	4	8.0	8.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	14	28.0	28.0	28.0
	3.00	17	34.0	34.0	62.0
	4.00	12	24.0	24.0	86.0
	5.00	7	14.0	14.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	4.0	4.0	4.0
	3.00	7	14.0	14.0	18.0
	4.00	29	58.0	58.0	76.0
	5.00	12	24.0	24.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	9	18.0	18.0	18.0
	4.00	32	64.0	64.0	82.0
	5.00	9	18.0	18.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	4.0	4.0	4.0
	3.00	5	10.0	10.0	14.0
	4.00	35	70.0	70.0	84.0
	5.00	8	16.0	16.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Kinerja Auditor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17.00	4	8.0	8.0	8.0
	18.00	3	6.0	6.0	14.0
	19.00	2	4.0	4.0	18.0
	20.00	3	6.0	6.0	24.0
	21.00	1	2.0	2.0	26.0
	22.00	2	4.0	4.0	30.0
	23.00	13	26.0	26.0	56.0
	24.00	13	26.0	26.0	82.0
	25.00	3	6.0	6.0	88.0
	26.00	2	4.0	4.0	92.0
	27.00	2	4.0	4.0	96.0
	28.00	2	4.0	4.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

LAMPIRAN 4

UJI KUALITAS DATA

1. Reliabilitas

Scale: Independensi

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.672	7

Reliability

Scale: Good Governance

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.766	6

Reliability

Scale: Kinerja Auditor

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.749	7

2. Validitas

Correlations

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Independensi
X1.1	Pearson Correlation	1	.283	.203	.228	.327*	-.015	.543**
	Sig. (2-tailed)		.627	.982	.374	.020	.916	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
X1.2	Pearson Correlation	.483	1	.296	.206	.271	.315*	.493**
	Sig. (2-tailed)	.627		.508	.968	.057	.026	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
X1.3	Pearson Correlation	.313	.498	1	.277	.281*	-.146	.312*
	Sig. (2-tailed)	.982	.508		.593	.048	.312	.027
	N	50	50	50	50	50	50	50
X1.4	Pearson Correlation	.128	.316	.487	1	.046	.249	.481**
	Sig. (2-tailed)	.374	.968	.593		.751	.081	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
X1.5	Pearson Correlation	.327*	.371	.281*	.346	1	.149	.626**
	Sig. (2-tailed)	.020	.057	.048	.751		.303	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
X1.6	Pearson Correlation	.315	.315*	.246	.349	.449	1	.529**
	Sig. (2-tailed)	.916	.026	.312	.081	.303		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Independensi	Pearson Correlation	.543**	.493**	.312*	.481**	.626**	.529**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.027	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Good Governance
X2.1	Pearson Correlation	1	.232	.431**	.830**	.882**	.864**
	Sig. (2-tailed)		.106	.002	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.2	Pearson Correlation	.292	1	.583**	.209	.207	.554**
	Sig. (2-tailed)	.106		.000	.146	.149	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.3	Pearson Correlation	.431**	.583**	1	.518**	.418**	.727**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	.003	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.4	Pearson Correlation	.830**	.209	.518**	1	.860**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.146	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.5	Pearson Correlation	.882**	.207	.418**	.860**	1	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.149	.003	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50
Good Governance	Pearson Correlation	.864**	.554**	.727**	.877**	.849**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Kinerja Auditor
Y1	Pearson Correlation	1	.688**	.235	.310*	.121	.285*	.711**
	Sig. (2-tailed)		.000	.100	.028	.402	.045	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Y2	Pearson Correlation	.688**	1	.236	.286*	.146	.172	.669**
	Sig. (2-tailed)	.000		.099	.044	.311	.231	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Y3	Pearson Correlation	.235	.336	1	.344*	-.066	-.054	.544**
	Sig. (2-tailed)	.100	.099		.015	.649	.711	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Y4	Pearson Correlation	.310*	.286*	.344*	1	.454**	.463**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.028	.044	.015		.001	.001	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Y5	Pearson Correlation	.121	.146	-.066	.454**	1	.669**	.528**
	Sig. (2-tailed)	.402	.311	.649	.001		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Y6	Pearson Correlation	.285*	.172	-.054	.463**	.669**	1	.594**
	Sig. (2-tailed)	.045	.231	.711	.001	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Kinerja Auditor	Pearson Correlation	.711**	.669**	.544**	.742**	.528**	.594**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 5

UJI HIPOTESIS

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Good Governance, Independensi ^b		Enter

a. Dependent Variable: absu

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.559 ^a	.312	.283	2.42961

a. Predictors: (Constant), Good Governance, Independensi

b. Dependent Variable: Kinerja Auditor

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	125.778	2	62.889	10.654	.000 ^b
	Residual	277.442	47	5.903		
	Total	403.220	49			

a. Dependent Variable: Kinerja Auditor

b. Predictors: (Constant), Good Governance, Independensi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.754	4.426		2.430	.019		
1 Independensi	-.262	.217	-.176	-1.210	.232	.693	1.443
Good Governance	.704	.161	.636	4.379	.000	.693	1.443

a. Dependent Variable: Kinerja Auditor